

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, dapat Penulis kemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

Dasar *improper constitution of tribunal* belum mendapat perhatian sebanyak alasan pembatalan lainnya berdasarkan Konvensi ICSID. Persoalan mengenai *improper constitution of tribunal* sebagai dasar pembatalan belum sepenuhnya dieksplorasi oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga menyebabkan kurangnya kesepakatan mengenai kapan Pasal 52(1)(a) Konvensi harus diterapkan. Selain itu, interpretasi yang bertentangan dari Komite Ad Hoc semakin memperumit masalah ini, menyoroti perlunya penelitian tambahan untuk memperjelas implikasi hukum dari masalah ini dan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada semua pihak yang terlibat.

Hasil temuan dari 13 persidangan pembatalan putusan (*annulment proceeding*) yang melibatkan dasar *improper constitution* menggambarkan pola yang menunjukkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam berhasilnya pembatalan putusan. Dari jumlah tersebut, hanya satu kasus, *Eiser v. Spanyol*, yang berhasil dibatalkan. Tantangan atas dasar *improper constitution* cenderung melibatkan isu-isu seperti disqualifikasi arbiter, kepatuhan terhadap ketentuan kewarganegaraan arbiter, dan kualitas arbiter sesuai dengan Pasal 14 Konvensi ICSID. Komite Ad Hoc, dalam menghadapi tantangan terhadap dasar *improper constitution*, memberlakukan standar yang berbeda tergantung pada apakah telah diajukan keberatan selama proses arbitrase atau setelah arbitrase ditutup. Standar "EDF Standard" digunakan dalam kasus tidak adanya keberatan pada proses arbitrase, yang mengharuskan pemohon membuktikan bahwa keberpihakan atau ketidakberpihakan arbitrator dapat memengaruhi keputusan akhir secara signifikan.

Adapun elemen dasar *improper constitution of the tribunal* mencakup isu independensi dan imparialitas, seringkali terkait dengan pelanggaran persyaratan tersebut dan ketidakungkapan informasi konflik kepentingan.

Selain itu, Rule 19 Acceptance of Appointment mengharuskan arbiter membuat pernyataan yang mengungkapkan hubungan dan keadaan yang dapat mempertanyakan independensinya. Beberapa kasus berdasarkan alasan teknis atau prosedural, seperti pemilihan arbiter dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak lisensi. Tuntutan juga dapat ditolak jika pemohon tidak menyampaikan kekhawatiran pada waktu yang tepat, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu dalam menanggapi *improper constitution*.

## B. Saran

Saran untuk meningkatkan mekanisme pembatalan (annulment) di ICSID dapat melibatkan beberapa langkah reformasi yang bertujuan untuk mengatasi kebingungan dan ketidakpastian terkait standar pembatalan terkait *improper constitution*. Berikut adalah elaborasi dari saran-saran tersebut:

### 1. Amandemen Konvensi ICSID

#### a) Pembentukan Doktrin Preseden

Secara khusus, amandemen dapat memasukkan ketentuan yang memungkinkan pengembangan doktrin preseden dalam kasus-kasus *improper constitution*. Hal ini akan memberikan pedoman hukum yang lebih jelas untuk penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

#### b) Badan Banding Tunggal

Amandemen dapat mempertimbangkan pembentukan badan banding tunggal yang khusus meninjau kasus-kasus pembatalan, terutama yang terkait dengan *improper constitution*. Badan ini dapat membantu memastikan konsistensi keputusan dan memberikan pandangan hukum yang lebih luas.

### 2. Reformasi Kualitatif Mekanisme Pembatalan

#### a) Perubahan Mandat Arbiter

Amandemen dapat merinci perubahan dalam mandat arbiter, menekankan kewajiban mereka untuk bersikap netral dan independen,

serta memberikan pedoman yang lebih jelas terkait dengan pengungkapan konflik kepentingan.

b) Revisi Kriteria Diskualifikasi

Kriteria diskualifikasi dapat direvisi untuk lebih spesifik dan melibatkan penilaian lebih ketat terhadap independensi dan imparialitas arbiter. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pihak yang terlibat.

c) *Independent Challenge Committee*

Membentuk komite independen khusus yang bertanggung jawab untuk menangani tantangan terhadap keberatan para pihak terhadap arbiter selama proses arbitrase.

3. Peningkatan Kepastian Hukum

a) Pengembangan Pedoman Prosedural

Menciptakan pedoman prosedural yang jelas terkait dengan penanganan kasus improper constitution, termasuk prosedur pengajuan tantangan, batas waktu, dan langkah-langkah konkret yang harus diikuti.

b) Pelatihan Arbiter

Memberikan pelatihan khusus kepada arbiter terkait dengan standar independensi dan imparialitas, serta pentingnya pengungkapan konflik kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap persyaratan etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka.

4. Keterlibatan Pihak Terkait

Konsultasi dengan Pihak-Pihak Terlibat

Melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk negara-negara peserta dan pihak swasta, dalam proses pembahasan amandemen. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa perubahan

yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan perspektif semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, pengajuan *advisory opinion* sebagai penafsiran Konvensi ICSID mengacu pada situasi di mana pihak yang terlibat dalam sengketa investasi memilih untuk mencari pandangan hukum formal dari International Court of Justice (ICJ) sebagai suatu cara untuk mengklarifikasi atau menafsirkan ketentuan dalam Konvensi ICSID.

Proses ini dapat dimulai ketika salah satu pihak dalam sengketa atau kedua belah pihak menganggap bahwa ada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam interpretasi suatu pasal atau aspek tertentu dari Konvensi ICSID yang mungkin memengaruhi keputusan arbitrase. Dalam usaha untuk memperoleh penjelasan resmi atau pandangan hukum yang dapat diandalkan, mereka dapat memutuskan untuk mengajukan pertanyaan tertentu kepada ICJ.

Namun, penting untuk dicatat bahwa *advisory opinion* yang diberikan oleh ICJ bersifat *non-binding*, artinya, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase ICSID. Namun, *advisory opinion* tersebut dapat memberikan panduan dan interpretasi hukum yang dapat memengaruhi pemahaman dan interpretasi kasus oleh pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase ICSID tersebut.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta mekanisme pembatalan yang lebih efektif, transparan, dan dapat diandalkan di ICSID. Reformasi ini akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas arbitrase internasional, dan merespons kompleksitas isu-isu yang muncul dalam kasus-kasus ICSID yang terkait dengan *improper constitution of the tribunal*.